

**KINERJA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN DANA PNPM MANDIRI
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi pada BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” Desa Turirejo, Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang)**

Teddy Persia Wibowo, Suwondo, Ike Wanusmawatie

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: teddykrupuk@gmail.com

Abstract: *The Performance of Badan Keswadayaan Masyarakat in Fund Management of PNPM Mandiri to Community Empowerment (Study in BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang).* This study to describe and analyzes the performance of BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” in fund management of PNPM Mandiri to community empowerment at Turirejo village. The methods used in this research is qualitative research. The focuses are divided into four aspects namely input, process, output, the supporting factors and the restricting factors. The results showed that the performance of Badan Keswadayaan Masyarakat to manage the funds of PNPM Mandiri can be said to be good, it can be seen from the apparatus competency, the ability to accommodate public aspirations, and the mechanism of fund management. Besides that, there are a supporting factors in the implementation of poverty alleviation program on BKM ABA are funding, public participation, the presence of training and availability of guidebook and facilities are complete, while restricting factors are the nature, the attitude of individualist citizens, and a negative perception of the society against the revolving loan of fund. The technique of collecting data on this study uses the technique of interview, observation, and documentation. It can be used to study material that related to the performance of Badan Keswadayaan Masyarakat in fund management of PNPM Mandiri to community empowerment.

Keywords: *empowerment, rural development, participation.*

Abstrak: **Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Mengelola Dana PNPM Mandiri untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang).** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kinerja BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” dalam mengelola dana PNPM Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Turirejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus ini terbagi menjadi 4 aspek yakni, *input*, proses, *output*, faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan kinerja BKM ABA dalam mengelola dana PNPM Mandiri sudah baik, hal tersebut dilihat dari segi kompetensi anggota, kemampuan menampung aspirasi masyarakat, dan mekanisme mengelola dana. Disamping itu ada faktor pendukung dalam pelaksanaan program yaitu pendanaan, partisipasi masyarakat, adanya pelatihan, tersedianya buku pedoman dan fasilitas yang lengkap, sedangkan faktor penghambatnya adalah alam, sikap individualis warga, dan persepsi negatif masyarakat terhadap dana pinjaman bergulir. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan kajian yang terkait dengan kinerja badan keswadayaan masyarakat dalam mengelola dana PNPM Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: pemberdayaan, pembangunan perdesaan, partisipasi

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif

untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena

hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (2012. h.1), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Meski dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin, data tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia masih banyak dan perlu penanganan yang lebih khusus dan fokus dari pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan pada pasal satu tertulis bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program yang terbentuk dari Undang Undang ini adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1999.

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri dalam proses pengucuran dananya dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM).

Badan Keswadayaan Masyarakat "Artha Bhakti Adhi Guna" merupakan BKM yang ada di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Badan Keswadayaan Masyarakat ini sudah dibentuk sejak tahun 2001. Dalam Badan Kemasyarakatan ini, ada beberapa program pelatihan untuk anggota relawan yang bertujuan untuk memancing para relawan membuat suatu wirausaha untuk menjalankan program yang berkelanjutan serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan *skill* dalam rangka menjalankan wirausahanya tersebut,

sehingga dana yang dikucurkan oleh PNPM Mandiri tidak habis begitu saja. Oleh karena itu, keberadaan BKM ini sangat diperlukan, namun ketika tahun 2008 sampai tahun 2010, lembaga ini mengalami stagnasi sehingga tidak mampu menghasilkan program maupun kegiatan yang membantu masyarakat setempat. Padahal berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa di Desa Turirejo terdapat penduduk miskin sekitar 387 kepala keluarga yang membutuhkan. dengan demikian, keberadaan BKM beserta kegiatannya masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Adhi Guna dalam mengelola dana PNPM Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi instansi terkait dalam usaha menanggulangi kemiskinan, dan penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.

Tinjauan Pustaka

A. Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut menurut Chandler dan Plano (1988. h.29-30) dalam Keban (2008. h.3), adalah proses di mana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Variasi makna administrasi publik dapat dilihat juga dari persepsi orang tentang kata "administrasi publik" itu sendiri. Ada yang menerjemahkan administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi dari publik, ada yang *administration for public* atau administrasi untuk publik, bahkan ada yang melihatnya sebagai *administration by public* atau administrasi oleh publik. Variasi terjemahan tersebut menarik karena dapat menunjukkan suatu rentangan kemajuan administrasi publik mulai dari administrasi publik yang berparadigma paling tidak demokratis sampai yang paling demokratis, atau dari yang tidak memperhatikan aspek pemberdayaan masya-

rahat sampai benar-benar memperhatikan pemberdayaan masyarakat.

Istilah *administration of public* menunjukkan bagaimana pemerintah berperanan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.

B. Kinerja

Mahsun (2006, h.25) mengatakan kinerja (*performance*) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Kinerja pada sektor publik meliputi kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi. Dimana untuk dapat mencapai tujuan organisasi diperlukan keseimbangan antara kinerja individu, kelompok dan organisasi.

Selanjutnya dalam Mahsun (2006, h.26) terdapat empat elemen pokok pengukuran kinerja, antara lain:

- a) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi,
- b) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja,
- c) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi,
- d) Evaluasi kinerja.

Mahsun (2006, h.26) juga menyampaikan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga cenderung bentuknya kualitatif, sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung sehingga cenderung bentuknya kuantitatif. Indikator dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan dalam menilai capaian tujuan organisasi yang dilihat dari tujuan, sasaran dan strategi.

Jenis indikator kinerja menurut Mahsun (2006, h.31) meliputi:

- a. Indikator masukan (*Input*)
- b. Indikator proses (*Process*)
- c. Indikator keluaran (*Output*)
- d. Indikator hasil (*Outcomes*)
- e. Indikator manfaat (*Benefit*)
- f. Indikator dampak (*Impact*)

Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 aspek untuk menjelaskan sebuah kinerja pemerintahan daerah, yang meliputi aspek *input*, proses dan *output* karena menurut

peneliti dengan hanya mengambil tiga elemen dalam indikator tersebut sudah dirasa cukup untuk menjelaskan sebuah kinerja dari instansi yang terkait.

C. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses pemberian kekuasaan dari pihak yang memiliki daya atau kemampuan seperti pemerintah kepada pihak yang tidak memiliki daya atau kemampuan, sehingga pihak yang sebelumnya tidak berdaya dan berada dalam keterbatasan tersebut mampu berjalan secara mandiri tanpa harus tergantung lagi kepada pihak lain.

Menurut Sulistiyani (2004, h.80-81) tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Strategi pemberdayaan masyarakat secara konseptual menurut Balai Besar PMD (2005, h.1) meliputi:

- a. Pendekatan Kelompok
- b. Penguatan Kelembagaan
- c. Pendampingan
- d. Pemberdayaan SDM
- e. Pemberian Stimulan

Dengan demikian upaya dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat haruslah dapat menggerakkan kemampuan masyarakat dalam berfikir, bertindak dan terlibat langsung dalam pembangunan.

D. PNPM MANDIRI

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan PNPM Mandiri adalah Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

E. BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

Menurut Pedoman Umum P2KP (2004, h.36) BKM adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi

kemiskinannya. Di samping itu BKM mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama. Pengenalan BKM terhadap PNPM Mandiri tidak ditujukan pada penciptaan lembaga-lembaga baru melainkan ditujukan pada upaya pemampuan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat melalui peningkatan peran-perannya.

Peran pokok BKM adalah menilai dan memberikan persetujuan, serta mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), baik yang berupa kelompok-kelompok usaha bersama (Kube), maupun kelompok pengelola pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. BKM mempunyai tanggung jawab untuk menyalurkan pengelolaan dana PNPM Mandiri di masyarakat wilayah penerima bantuan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana PNPM Mandiri.

A. Input

1. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Ahi Guna di Desa Turirejo

- Persyaratan menjadi anggota BKM
- Mekanisme pelaksanaan pembentukan anggota BKM
- Pengesahan anggota BKM

2. Kemampuan anggota BKM

- Kemampuan menampung aspirasi masyarakat
- Kemampuan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pengembangan program bagi masyarakat miskin
- Kemampuan menyalurkan informasi secara jelas dan transparan kepada masyarakat

B. Proses

1. Mekanisme BKM dalam mengelola dana PNPM Mandiri jika ditinjau dari:

- Perencanaan penggunaan dana PNPM Mandiri
- Pemanfaatan dana PNPM Mandiri
- Pertanggungjawaban penggunaan dana PNPM Mandiri

C. Output

1. Pemberdayaan Masyarakat

- Kapasitas lembaga
- Kesempatan kerja
- Partisipasi masyarakat

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan dana PNPM

Mandiri pada BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

A. Pendukung

B. Penghambat

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Turirejo dan situs penelitian pada kantor Badan Keswadayaan Artha Bhakti Adhi Guna. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan Model Interaktif sedangkan analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana PNPM Mandiri.

A. Input

1. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Ahi Guna di Desa Turirejo

a. Persyaratan menjadi anggota BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Adhi Guna membutuhkan anggota sebanyak sembilan orang. Desa memberikan kesempatan penuh kepada masyarakat untuk mencalonkan diri mereka untuk menjadi anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), tidak ada persyaratan khusus untuk mendaftar sebagai calon anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Setiap Rukun Tetangga mengirimkan calon anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) minimal dua orang.

b. Mekanisme pelaksanaan pembentukan anggota BKM

Setelah adanya calon anggota BKM, setiap wakil calon anggota di setiap RT dikumpulkan di Balai Desa kemudian di *voting* secara langsung oleh masyarakat. Kemudian BKM/LKM dapat membentuk Sekretariat, dan unit-unit satuan pelaksana dan memilih serta mengangkat penasehat sesuai kebutuhan. Bila ternyata pilihan masyarakat jatuh pada memampukan lembaga yang ada maka bila diperlukan, keanggotaan pimpinan kolektif dapat dilakukan peremajaan atau penggantian dengan tata cara sebagaimana layaknya pemilihan anggota BKM/LKM.

c. Pengesahan anggota BKM

Setelah tercapai kata mufakat oleh masyarakat, anggota sembilan orang yang terpilih akan disahkan oleh Kepala Desa dan Notaris PPATK, dan sudah sah dimata hukum

sebagai anggota Badan Keswadayaan Masyarakat.

2. Kemampuan anggota BKM

a. Kemampuan menampung aspirasi masyarakat

Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Adhi Guna (ABA) dalam menampung aspirasi masyarakat terdapat dua cara, yaitu melalui acara Rembug Masyarakat dan mendatangi perangkat RT/RW di desa Turirejo.

b. Kemampuan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pengembangan program bagi masyarakat miskin

Setelah menampung aspirasi masyarakat yang dikumpulkan melalui dua metode yaitu melalui forum rembug masyarakat dan mendatangi langsung ketua RT/RW, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Artha Bhakti Adhi Guna (ABA) ini akan mempertimbangkan aspirasi yang cocok untuk program pengentasan rakyat miskin. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ini mempunyai program untuk rakyat miskin, ada beberapa program di bidang pembangunan seperti pavingisasi jalan, drainase, dan lain-lain.

c. Kemampuan menyalurkan informasi secara jelas dan transparan kepada masyarakat

Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Adhi Guna dalam memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada masyarakat Desa Turirejo adalah membuat papan pengumuman yang menunjukkan bahwa pembangunan tersebut adalah hasil program yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Adhi Guna. Penempelan papan pengumuman yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Adhi Guna di tempat-tempat yang strategis ini memang terbukti mendapatkan perhatian dari masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui dari mana program pembangunan tersebut, berapa biaya yang dikeluarkan, dan berapa lamanya program tersebut dijalankan.

B. Proses

1. Mekanisme BKM dalam mengelola dana PNPM Mandiri jika ditinjau dari:

a. Perencanaan penggunaan dana PNPM Mandiri

Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Adhi Guna dalam merencanakan penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan adalah dengan cara melakukan kegiatan yang biasa disebut perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah sesuai fungsinya

masing-masing. Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Adhi Guna setelah merumuskan perencanaan kegiatan, maka akan membuat dokumen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) yang berisi perincian kegiatan serta estimasi biaya pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian dokumen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan tersebut diserahkan pada Koordinator Kota (korkot) untuk diverifikasi kelengkapan dokumen tersebut.

b. Pemanfaatan dana PNPM Mandiri

Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Adhi Guna dalam memanfaatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan adalah untuk berbagai macam program pembangunan. Secara garis besar penggunaan dana tersebut adalah untuk program pembangunan diantaranya:

1. Pavingisasi;
2. Drainase;
3. Lapen;
4. Bedah Rumah.

c. Pertanggungjawaban penggunaan dana PNPM Mandiri

BKM ABA dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana PNPM Mandiri itu adalah dengan cara membuat sebuah laporan pertanggungjawaban atau biasa disebut LPJ. LPJ itu berisi tentang semua uang yang masuk dan keluar, dan harus disertai kuitansi dan materai. Jadi semua UP UP yang ada di sini dikumpulkan untuk membuat LPJ bersama-sama. Setelah LPJ jadi, BKM akan menyerahkan dokumen tersebut ke Korkot.

C. Output

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Kapasitas lembaga

Yang dimaksud dengan penguatan kelembagaan masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN PM) Mandiri Perkotaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang telah dibangun agar dapat diterima sebagai sebuah norma dan perilaku baru di masyarakat dalam rangka melestarikan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis nilai. Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) Artha Bhakti Adhi Guna (ABA) di desa Turirejo adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk, ditetapkan oleh masyarakat, dan bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan.

b. Kesempatan kerja

Pencapaian kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Artha Bhakti Adhi Guna (ABA) dalam pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN PM)

Mandiri untuk program-program penanggulangan kemiskinan dapat memberdayakan masyarakat di sekitar proyek untuk mendapatkan kesempatan kerja. Misalkan ada proyek bedah rumah, para penduduk atau warga disekitar proyek tersebut akan dihimpun oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk diajak bekerja membangun rumah yang dijadikan proyek tersebut dan dibayar. Akan tetapi kesempatan kerja dalam proyek ini tidak setiap hari ada. Jika ada proyek saja masyarakat akan diajak bekerja, jika tidak ada proyek maka tidak akan ada kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

c. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dibagi menjadi tiga. Diantaranya adalah: partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi. Untuk mencapai partisipasi yang bagus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan menganggarkan dana untuk fasilitator kelurahan dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Artha Bhakti Adhi Guna (ABA) untuk dapat menyaring sebanyak mungkin aspirasi atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini. Dan pada faktanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Artha Bhakti Adhi Guna (ABA) ini rutin minimal satu tahun sekali mengadakan forum Rembug Warga Tahunan (RWT) untuk menjaring aspirasi dari masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

A. Pendukung

1. Pendanaan
2. Partisipasi Masyarakat
3. Adanya pelatihan
4. Tersedianya buku pedoman dan fasilitas yang lengkap

B. Penghambat

1. Alam,
2. Sikap individualis warga,
3. Persepsi negatif masyarakat terhadap dana pinjaman bergulir.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat Artha Bhakti Adhi Guna dalam mengelola dana PNPM Mandiri sudah dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari kompetensi anggota (SDM), kemampuan menampung aspirasi masyarakat, dan mekanisme yang terdiri dari perencanaan penggunaan dana, pemanfaatan dana, dan pertanggungjawaban penggunaan dana serta hasil dari pemberdayaan masyarakat untuk penguatan lembaga, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat.

Dan dari penyajian data tersebut ada beberapa saran, yaitu: untuk lebih meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota BKM ABA dalam mengelola dana PNPM Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat, maka perlu kiranya Badan Keswadayaan Masyarakat ini dalam memilih anggotanya dalam pemilihan menetapkan standart pendidikan yang dimiliki oleh setiap calon anggota, dan perlu ditingkatkan lagi pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Karena sekarang sudah jarang dilakukannya pelatihan untuk masyarakat. Hal ini sangat berguna untuk masyarakat karena memiliki *soft skill* yang dapat dijadikan andalan untuk mencari pekerjaan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2012) **Profil Kemiskinan di Indonesia September 2011**. Jakarta. BPS.
- Basrowi dan Suwandi. (2008) **Penelitian Kualitatif**. Jakarta. Rineka Cipta.
- Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum. (2012) **Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan**. Jakarta.
- Keban, Yermias T. (2008) **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu**. Yogyakarta. Gava Media.
- Krismanto, R. Arief Rahadi, dkk. (2004) **Pedoman Teknis P2KP**. Jakarta. Direktorat Jendral Perumahan dan Pemukiman. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- Lembar Bacaan Balai Besar PMD. (2005) **Konsep Pemberdayaan Masyarakat**. Malang. BBPMD.
- Mahsun, Muhamad. (2006) **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**. Malang. BPFE-X.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2008) **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung, Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004) **Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia**. Yogyakarta. Gava Media.